



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IS PURWANTI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Padas RT 002 RW 012, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian:, QC, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat I**
2. **TATIK SUMARSI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Pulosari RT 003 RW 005, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah Bagian: Operator Inspeck, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat II**
3. **APIT SUMADIANA**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Dukuhan RT 002 RW 007 Malangaten, Kebakkramat, Karanganyar.Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Karu AJL, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat III**
4. **ENI HASTUTI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Jetis RT 002 RW 008 Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Operator Tenun, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat IV**
5. **EVI NUR WIJAYANTI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Natah RT 001 RW 001 Sidokerto, Plupuh, Sragen Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Trainer, Kewarganegaraan: Indonesia, , selanjutya disebut: **Penggugat V**
6. **SUKAMTO**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Kembu RT 004 RW 001 Waru, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Beam Steel, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat VI**
7. **EKO SUPRIYANTO**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Waru RT 003 RW 004 Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Karu, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat VII**
8. **SRI HARTINI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Nangsri Kidul RT 002 RW 002 Nangsri, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Bagian: Pemberes, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat VIII**

9. **YAYUK DWI LESTARI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Lajer RT 004 RW 017 Kaliwuluh, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Karu Inspek, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat IX**;

10. **CATUR RAHAYU**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Gerdu RT 003 RW 006 Waru, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Karu A, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat X**

11. **TRI PURNANI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Nangsri Kidul RT 001 RW 002 Nangsri, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: ADM Folding, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat XI**

12. **SUMARNI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Gedangan Kidul RT 002 RW 019 Kaliwuluh, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Cheker AJL, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat XII**

13. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Kedungringin RT 008 RW 002 Waru, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Karu, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat XIII**

14. **PARINEM**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Malangaten RT 003 RW 002 Malangaten, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Cucuk, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat XIV**

15. **SRI NINGSIH**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Karang Kidul RT 006 RW 002 Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Karu AJL, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat XV**

16. **SRI MURTINI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Simo Kidul RT 002 RW 005 Kebak, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: PU Cucuk, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutya disebut: **Penggugat XVI**

17. **TRIYANTO**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Dalemrejo RT 003 RW 002 Kaliwuluh, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Bagian: Sizing, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut: **Penggugat XVII**

18. **SRI WIYARNI**, bertempat tinggal/berkedudukan di: Dalemrejo RT 002 RW 002 Kaliwuluh, Kebakkramat, Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Bagian: Pemberes, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut: **Penggugat XVIII**

dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XVIII** memberikan kuasa kepada: **DANANG SUGIYATNO, S.H.**, selaku: Advokat beralamat/berkantor di: Sambirejo RT 003 RW 002 Jetis, Jaten, Karanganyar / email: danangsugiyatno90@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 3201/SK/XII/2023/PN Smg tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE, yang berkedudukan di Jl. Raya Solo-Sragen KM.12 Karanganyar Jawa Tengah, email: dmdt2personalia@gmail.com, diwakili oleh Direksi: **EVY ARI ISPRASETYANTO, S.H.**, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SUPARNO, S.H.**, dan **EMA AMBAR MULATSIH, S.PSI.**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 292/SK/I/2024/PN.SMG tanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 292/SK/I/2024/PN Smg tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang dilampiri Anjuran Mediator Nomor 565.15/4249.7.3/XI/2023 tanggal 3 November 2023 dan risalah penyelesaian penyelesaian hubungan industrial Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tanggal 21 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Is Purwanti (Penggugat I) adalah Karyawan Tergugat , bekerja di bagian QC dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
2. Tatik Sumarsi (Penggugat II) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Operator Inspeck dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
3. Apit Sumadiana (Penggugat III) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Karu AJL dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.3.561.686,-.
Upah Penggugat III yang pernah diterima adalah Rp.3.561.686 dan untuk penerimaan upah bulan-bulan selanjutnya tidak penuh karena diliburkan /libur bergilir olehTergugat dan bila diliburkan tidak dibayar . Dan upah yang telah diterima oleh pekerja termasuk Penggugat III tidak boleh berkurang sehingga upah Penggugat III yang pernah diterima adalah Rp. 3.561.686.
4. Eni Hastuti (Penggugat IV) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Operator Tenun dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
5. Evi Nur Wijayanti(Penggugat V) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Trainer dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
6. Sukamto(Penggugat VI) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Beam Steel dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
7. Eko Supriyanto (Penggugat VII) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Karu dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.3.448.780,-
Upah PenggugatVII yang pernah diterima adalah Rp.3.448.780 dan untuk penerimaan upah bulan-bulan selanjutnya tidak penuh karena diliburkan /libur bergilir olehTergugat dan bila diliburkan tidak dibayar Dan upah yang telah diterima oleh pekerja termasuk Penggugat VII tidak boleh berkurang sehingga upah Penggugat VII yang pernah diterima adalah Rp. 3.448.780;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sri Hartini(Penggugat VIII) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Pemberes upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 9. Yayuk Dwi Lestari(Penggugat IX) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Karu Inspek dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.239.313,- .
 10. Catur Rahayu (Penggugat X) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Karu A dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 11. Tri Purnani(Penggugat XI) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian ADM Folding dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 12. Sumarni(Penggugat XII) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Cheker AJL dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 13. Sri Wahyuni (Penggugat XIII) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Karu dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 14. Parinem (Penggugat XIV) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Cucuk dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 15. Sri Ningsih (Penggugat XV) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Karu AJL dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 16. Sri Murtini (Penggugat XVI) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian PU Cucuk dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
 17. Triyanto (Penggugat XVII) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Sizzing dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023)
 18. Sri Wiyarni (Penggugat XVIII) adalah Karyawan Tergugat, bekerja di bagian Pemberes dan upah terakhir yang diterima adalah Rp.2.207.483,- (Sesuai UMK Karanganyar 2023).
2. Bahwa Para Penggugat tersebut sejak bulan September 2022 diliburkan oleh Tergugat dengan alasan sepi order dan diberitahu apabila diliburkan tidak dibayar. Hal tersebut tidak ada pemberitahuan secara resmi dan tidak

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perundingan dan kesepakatan sebelumnya dengan Para Penggugat dan pekerja lainnya.

Bahwa perselisihan tersebut sudah diadakan Mediasi dan sudah keluar anjuran. Jawaban dari para penggugat menerima sedangkan dari tergugat tidak memberikan jawaban berarti menolak anjuran. Jadi salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PHI.

3. Bahwa sesuai dengan UU 13/ 2003 Tentang KETENAGAKERJAAN Pasal 93

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

SE-05/M/BW/1998 tentang UPAH PEKERJAN DIRUMAHKAN

Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga sebagai upaya untuk penyelamatan perusahaan, maka perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu. Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja, selama dirumahkan maka dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya di rumahkan.

Jadi apabila perusahaan meliburkan pekerja dengan alasan apapun pengusaha tetap membayar upah secara penuh terkecuali bila sudah ada perundingan dan kesepakatan terlebih dulu mengenai besarnya upah selama dirumahkan/diliburkan dan lamanya dirumahkan/diliburkan.

Bahwa dalam anjuran pada poin : 2 juga menganjurkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada pihak pengusaha PT Delta Merlin Dunia Tekstil II yang beralamat di Jl Raya Solo- Sragen Km 14 Karanganyar untuk membayar upah penuh 100% kepada pihak pekerja Sdr. Is Purwanti, Sdr Tatik Sumarni, Sdr Apit Sumadiana, Sdr Eni Hastuti, Sdr Evi Nur Wijayanti, Sdr Sukamto, Sdr Eko Supriyanto, Sdr Sri Hartini, sdr Yayuk Sri Lestari, Sdr Catur Rahayu, sdr Tri Purnani, sdr Sumarni, Sdr Sri Wahyuni, Sdr Parinem, Sdr Sri Ningsih, Sdr Sri Murtini, Sdr Triyanto, dan Sdr Sri Wiyarni selama diliburkan.

Karena sampai sekarang / bulan Desember 2023 para Penggugat masih diliburkan, maka para Penggugat tetap menuntut upah penuh 100% sampai selesainya perselisihan ini.

4. Bahwa sesuai dengan UU 13/2003 Pasal 93 huruf (f) dan SE-05/M/BW/1998 dan anjuran pada poin : 2 tersebut, maka Para Penggugat meminta apabila diliburkan oleh Tergugat upah dibayar penuh. Yaitu:

REKAPAN KEKURANGAN GAJI PEKERJA DMDT II

Is Purwanti DKK

No.	Nama Pekerja	Gaji Bulan	Gaji Seharusnya	Gaji Yang diterima	Kekurangan Gaji
1	Is Purwanti	November'22	Rp 2,064,131	Rp 1,100,967	Rp 963,164
		Desember	Rp 2,064,131	Rp 1,445,019	Rp 619,112
		Januari'23	Rp 2,207,483	Rp 919,785	Rp 1,287,698
		Februari	Rp 2,207,483	Rp 1,103,742	Rp 1,103,741
		Maret	Rp 2,207,483	Rp 735,828	Rp 1,471,655
		April	Rp 2,207,483	Rp 882,994	Rp 1,324,489
		Mei	Rp 2,207,483	Rp 809,411	Rp 1,398,072
		Juni	Rp 2,207,483	Rp 1,177,325	Rp 1,030,158
		Juli	Rp 2,207,483	Rp 1,508,447	Rp 699,036
		Agustus	Rp 2,207,483	Rp 956,576	Rp 1,250,907
		September	Rp 2,207,483	Rp 1,250,908	Rp 956,575
		Oktober	Rp 2,207,483	Rp 809,411	Rp 1,398,072
		November	Rp 2,207,483	Rp 882,994	Rp 1,324,489
					Rp 14,827,168
2	Tatik Sumarsi	Oktober'22	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,064,313	1,460,746	603,567
			Rp	Rp	Rp
		November	2,064,313	1,535,405	528,908
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,689,924	374,389
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,349,932	857,551
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,404,023	803,460
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	839,095	1,368,388
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	734,802	1,472,681
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	586,637	1,620,846
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	812,385	1,395,098
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	139,073	2,068,410
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	662,245	1,545,238
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	882,994	1,324,489
					Rp
					16,612,004
3	Apit Sumadiana	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			3,561,686	2,329,987	1,231,699
			Rp	Rp	Rp
		November	3,561,686	1,926,846	1,634,840
			Rp	Rp	Rp
		Desember	3,561,686	2,354,791	1,206,895
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	3,561,686	1,794,726	1,766,960
			Rp	Rp	Rp
		Februari	3,561,686	2,008,426	1,553,260
			Rp	Rp	Rp
		Maret	3,561,686	878,439	2,683,247
			Rp	Rp	Rp
		April	3,561,686	1,051,895	2,509,791
			Rp	Rp	Rp
		Mei	3,561,686	978,312	2,583,374
			Rp	Rp	Rp
		Juni	3,561,686	1,859,809	1,701,877
			Rp	Rp	Rp
		Juli	3,561,686	1,508,140	2,053,546
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	3,561,686	925,060	2,636,626
			Rp	Rp	Rp
		September	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,561,686	1,304,391	2,257,295
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	3,561,686	1,165,391	2,396,295
			Rp	Rp	Rp
		November	3,561,686	956,576	2,605,110
					Rp
					28,820,815
4	Eni Hastutik	November'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,307,398	756,915
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,513,830	550,483
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	882,994	1,324,489
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,618,822	588,661
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,692,404	515,079
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,765,987	441,496
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,324,490	882,993
					Rp
					10,946,735
5	Evi Nur Wijayanti	November'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,100,967	963,346
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,376,209	688,104
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Juli	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,207,483	1,471,656	735,827
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,030,159	1,177,324
					Rp
					11,805,869
6	Sukamto	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,445,019	619,294
			Rp	Rp	Rp
		November	2,064,313	1,238,588	825,725
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,582,640	481,673
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	882,994	1,324,489
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	1,030,159	1,177,324
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,030,159	1,177,324
					Rp
					11,345,281
7	Eko Supriyanto	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			3,448,780	2,257,987	1,190,793
			Rp	Rp	Rp
		November	3,448,780	1,862,846	1,585,934
			Rp	Rp	Rp
		Desember	3,448,780	2,317,848	1,130,932
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	3,448,780	1,872,978	1,575,802
			Rp	Rp	Rp
		Februari	3,448,780	1,948,426	1,500,354
			Rp	Rp	Rp
		Maret	Rp	Rp	Rp

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3,448,780	836,869	2,611,911
			Rp	Rp	Rp
		April	3,448,780	1,015,895	2,432,885
			Rp	Rp	Rp
		Mei	3,448,780	942,312	2,506,468
			Rp	Rp	Rp
		Juni	3,448,780	1,791,809	1,656,971
			Rp	Rp	Rp
		Juli	3,448,780	1,644,140	1,804,640
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	3,448,780	930,477	2,518,303
			Rp	Rp	Rp
		September	3,448,780	1,300,517	2,148,263
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	3,448,780	1,003,391	2,445,389
			Rp	Rp	Rp
		November	3,448,780	1,030,159	2,418,621
					Rp
					27,527,266
8	Sri Hartini	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,169,777	894,536
			Rp	Rp	Rp
		November	2,064,313	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,513,830	550,483
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,177,352	1,030,131
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	882,994	1,324,489
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,348,353	859,130
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	817,273	1,390,210
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,765,987	441,496
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,618,822	588,661
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,177,325	1,030,158
					Rp
					13,186,503
9	Yayuk Dwi		Rp	Rp	Rp
	Lestari	Oktober'22	2,064,313	1,582,640	481,673
		November	Rp	Rp	Rp

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,064,313	1,376,209	688,104
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,582,640	481,673
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,471,656	735,827
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	1,030,159	1,177,324
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	1,177,325	1,030,158
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,802,779	404,704
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,545,239	662,244
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,376,209	831,274
					Rp
					10,687,197
10	Catur Rahayu	November'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,238,588	825,725
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,307,398	756,915
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,177,325	1,030,158
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,398,073	809,410
			Rp	Rp	Rp
		November	Rp	Rp	Rp

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,207,483	1,140,533	1,066,950
					Rp
					11,773,848
11	Tri Purnani	November'22	Rp 2,064,313	Rp 1,479,424	Rp 584,889
		Desember	Rp 2,064,313	Rp 1,479,424	Rp 584,889
		Januari'23	Rp 2,207,483	Rp 1,030,159	Rp 1,177,324
		Februari	Rp 2,207,483	Rp 1,545,239	Rp 662,244
		Maret	Rp 2,207,483	Rp 1,250,908	Rp 956,575
		April	Rp 2,207,483	Rp 1,177,325	Rp 1,030,158
		Mei	Rp 2,207,483	Rp 1,030,159	Rp 1,177,324
		Juni	Rp 2,207,483	Rp 1,324,490	Rp 882,993
		Juli	Rp 2,207,483	Rp 1,545,239	Rp 662,244
		Agustus	Rp 2,207,483	Rp 1,214,116	Rp 993,367
		September	Rp 2,207,483	Rp 1,618,822	Rp 588,661
		Oktober	Rp 2,207,483	Rp 1,471,656	Rp 735,827
		November	Rp 2,207,483	Rp 1,214,116	Rp 993,367
					Rp
					11,029,862
12	Sumarni	Desember'22	Rp 2,064,313	Rp 1,376,209	Rp 688,104
		Januari'23	Rp 2,207,483	Rp -	Rp -
		Februari	Rp 2,207,483	Rp 1,177,325	Rp 1,030,158
		Maret	Rp 2,207,483	Rp 735,828	Rp 1,471,655
		April	Rp 2,207,483	Rp 882,994	Rp 1,324,489
		Mei	Rp 2,207,483	Rp 882,994	Rp 1,324,489
		Juni	Rp 2,207,483	Rp 1,250,908	Rp 956,575
		Juli	Rp 2,207,483	Rp 1,545,239	Rp 662,244
		Agustus	Rp 2,207,483	Rp 1,177,325	Rp 1,030,158
		September	Rp 2,207,483	Rp 1,765,987	Rp 441,496
		Oktober	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,207,483	1,765,987	441,496
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,177,325	1,030,158
					Rp
					10,401,022
13	Sri Wahyuni	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,238,588	968,895
			Rp	Rp	-Rp
		November	2,064,313	1,100,967	1,100,967
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,445,019	619,294
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,066,951	997,362
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,177,325	1,030,158
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	882,994	1,324,489
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,103,742	1,103,741
					Rp
					12,301,245
14	Parinem	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,513,830	693,653
			Rp	Rp	-Rp
		November	2,064,313	791,320	791,320
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,204,183	860,130
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	441,497	1,765,986
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	625,454	1,582,029
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	1,030,159	1,177,324
			Rp	Rp	Rp
		Juni	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,207,483	1,287,699	919,784
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,434,865	772,618
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	1,030,159	1,177,324
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,398,073	809,410
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,177,325	1,030,158
					Rp
					12,425,326
15	Sri Ningsih	Desember'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,445,019	619,294
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	882,994	1,324,489
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	1,030,159	1,177,324
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,765,987	441,496
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,618,822	588,661
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,177,325	1,030,158
					Rp
					10,920,875
16	Sri Murtini	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,582,640	624,843
			Rp	Rp	-Rp
		November	2,064,313	1,341,803	1,341,803
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,307,398	756,915
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,508,447	555,866
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,214,116	993,367
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
			Rp	Rp	Rp
		April	Rp	Rp	Rp

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2,207,483	588,662	1,618,821
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	1,066,951	1,140,532
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,324,490	882,993
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	-	-
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,287,699	919,784
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,177,325	1,030,158
					Rp
					10,860,613
17	Triyanto	Oktober'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,513,830	693,653
			Rp	Rp	Rp
		November	2,064,313	-	-
			Rp	Rp	Rp
		Desember	2,064,313	1,307,398	756,915
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	1,545,239	519,074
			Rp	Rp	Rp
		Februari	2,207,483	1,250,908	956,575
			Rp	Rp	Rp
		Maret	2,207,483	846,202	1,361,281
			Rp	Rp	Rp
		April	2,207,483	662,245	1,545,238
			Rp	Rp	Rp
		Mei	2,207,483	1,177,325	1,030,158
			Rp	Rp	Rp
		Juni	2,207,483	1,471,656	735,827
			Rp	Rp	Rp
		Juli	2,207,483	1,692,404	515,079
			Rp	Rp	Rp
		Agustus	2,207,483	846,202	1,361,281
			Rp	Rp	Rp
		September	2,207,483	1,177,325	1,030,158
			Rp	Rp	Rp
		Oktober	2,207,483	1,398,073	809,410
			Rp	Rp	Rp
		November	2,207,483	1,177,325	1,030,158
					Rp
					12,344,807
18	Sri Wiyarni	Desember'22	Rp	Rp	Rp
			2,064,313	1,513,830	550,483
			Rp	Rp	Rp
		Januari'23	2,207,483	956,576	1,250,907
			Rp	Rp	Rp
		Februari	Rp	Rp	Rp



		2,207,483	1,177,325	1,030,158
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	-	-
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	809,411	1,398,072
		Rp	Rp	Rp
	Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
		Rp	Rp	Rp
	Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
	Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
		Rp	Rp	Rp
	Agustus	2,207,483	1,030,159	1,177,324
		Rp	Rp	Rp
	September	2,207,483	1,765,987	441,496
		Rp	Rp	Rp
	Oktober	2,207,483	1,692,404	515,079
		Rp	Rp	Rp
	November	2,207,483	1,398,073	809,410
				Rp
				10,189,820

Untuk selanjutnya apabila Para Penggugat tersebut diliburkan oleh Tergugat maka Para Penggugat meminta untuk tetap dibayar penuh 100%

5. Bahwa sebelumnya para Penggugat mendapatkan hak cuti tahunan tetapi sejak tahun 2020 para Penggugat sudah tidak mendapatkan hak cuti tahunan sampai sekarang, sehingga Penggugat tetap meminta hak cuti tahunan yang belum diberikan oleh Tergugat sejak tahun 2020.

Dalam UU No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No.2 Tahun 2022 Tentang CIPTA KERJA menjadi Undang- Undang **Pasal 79**

(1) *Pengusaha wajib memberi:*

- a. waktu istirahat; dan
- b. cuti.

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

- a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hak cuti tahunan yang harus dibayarkan Tergugat tahun 2021,2022,dan 2023 sebagai berikut;

- 1) Penggugat I cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**

Tahun	UMK KARANGANYAR	Upah Perhari (PEMBAGIAN 25 HARI)	Cuti Tahunan (12 x Upah)	Jumlah Upah Cuti Tahunan
2021	Rp.2.054.040,-	Rp.2.054.040,- : 25	Rp.82.162 X 12	Rp. 985.944,-
2022	Rp.2.064.313,-	Rp.2.064.313,- : 25	Rp.82.572 X 12	Rp. 990.864,-
2023	Rp.2.207.483,-	Rp.2.207.483,- : 25	Rp.88.299 X 12	Rp.1.059.588,-
	TOTAL:			Rp.3.036.396

- 2) Penggugat II cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 3) Penggugat III cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 4) Penggugat IV cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 5) Penggugat V cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 6) Penggugat VI cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 7) Penggugat VII cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 8) Penggugat VIII cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 9) Penggugat IX cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 10)Penggugat X cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 11)Penggugat XI cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 12)PenggugatXII cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 13)Penggugat XIII cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**
- 14)Penggugat XIV cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15)Penggugat XV cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**

16)Penggugat XVI cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**

17)Penggugat XVII cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**

18)Penggugat XVIII cuti tahunan tahun 2021,2022,2023 yang belum dibayar sebesar: **Rp.3.036.396**

Bahwa sesuai dengan data dan fakta di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah penuh sejak para penggugat diliburkan;
- 3) Menghukum kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kekurangan upah dari para penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I sebesar: **Rp. 14,827,168,-**
2. Penggugat II sebesar: **Rp. 16,612,004,-**
3. Penggugat III sebesar: **Rp. 28,820,3822,-**
4. Penggugat IV sebesar: **Rp. 10,946,735,-**
5. Penggugat V sebesar: **Rp. 11,805,869,-**
6. Penggugat VI sebesar: **Rp. 11,345,281,-**
7. Penggugat VII sebesar: **Rp. 27,527,266,-**
8. Penggugat VIII sebesar: **Rp. 13,186,503,-**
9. Penggugat IX sebesar: **Rp. 10,687,197,-**
10. Penggugat X sebesar: **Rp. 11,773,848,-**
11. Penggugat XI sebesar: **Rp. 11,029,862,-**
12. Penggugat XII sebesar: **Rp. 10,401,022,-**
13. Penggugat XIII sebesar: **Rp. 12,301,245,-**
14. Penggugat XIV sebesar: **Rp. 12,425,326,-**
15. Penggugat XV sebesar: **Rp. 10,920,875,-**
16. Penggugat XVI sebesar: **Rp. 10,860,613,-**
17. Penggugat XVII sebesar: **Rp. 12,344,807,-**
18. Penggugat XVIII sebesar: **Rp. 10,189,820,-**

- 4) Menghukum tergugat untuk membayar cuti tahunan tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar: **Rp.3.036.396,-**
- 5) Membayar upah penuh selanjutnya apabila para Penggugat diliburkan.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequa et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasa dan Tergugat juga menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan elektronik dan terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan pada tanggal yang isinya diperbaiki oleh Para Penggugat sebagai berikut;

1. Perbaikan pada Pemberi Kuasa dari awal 18 orang menjadi 17 orang atas nama
Nama : Tri Purnani
Alamat : Nangsri Kidul RT 01 RW 02 Nangsri Kabakkramat Karanganyar
Dihapus karena gugatannya dicabut
2. Perbaikan pada Tergugat, yang benar adalah:
Nama : PT. Delta Merlin Dunia Tetile
Alamat : DesaPulosari Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah
3. Perbaikan pada posita No 1 pada poin 11
Atas nama Tri Purnani (Penggugat XI) dihapus karena sudah dicabut gugatannya
4. Perbaikan pada posita No 3 pada rekapan kekurangan gaji pekerja DMDT II Is Purwanti Dkk pada no 11 nama Tri Purnani dihapus
5. Perbaikan pada posita No 3 pada rekapan kekurangan gaji pekerja DMDT II Is Purwanti Dkk pada no 11 nama Tri Purnani dihapus
6. Perbaikan pada petitum No 3 pada poin 11 Penggugat XI dihapus

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pada pernyataan para penggugat dalam surat gugatan "karyawan libur tidak dibayar hal tersebut tidak diberitahukan sebelumnya kepada karyawan" adalah pernyataan yang salah dan mengada-ada.
Alasannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memberitahukan tentang kondisi dan kebijakan Upah Perusahaan kepada penggugat dan seluruh karyawan secara resmi melalui perwakilan Karyawan (pengurus KSPN) dalam Pertemuan Bipartit. Karyawan sudah mengetahui dan menerima dengan bukti semua karyawan membuat surat pernyataan tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang isinya menyatakan bahwa :

1. Sanggup masuk kerja secara bergilir sesuai dengan kebutuhan Perusahaan
2. Tidak menuntut libur gilirnya untuk dibayar
3. Tidak menuntut kompensasi apapun dari perusahaan apabila sedang dliiburkan.
(surat pernyataan terlampir)

2. Bahwa gugatan penggugat pada point 3 : UU 13/2003 Pasal 93 Ayat 2 huruf (f) "Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang udah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha" adalah gugatan yang sangat tidak berdasar.

Alasan:

Kondisi makro dunia pertekstilan yang suliit adalah kondisi yang tidak disengaja dan tidak diirencanakan oleh Tergugat, kondisi yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dikendalikan juga tidak dapat dicegah oleh Tergugat akibat dampak berkelanjutan dari covid19.

Tergugat tidak memperkerjakan Penggugat bukan sebuah kesengajaan namun karena kondisi memaksa karena sepinya Order Produksi yang masuk.

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang gugatan pemenuhan gaji penggugat saat diliburkan, Tergugat tidak punya kewajiban untuk melaksanakan.

Alasan:

1. Surat pernyataan para Penggugat untuk Tidak menuntut kompensasi apapun dari Perusahaan apabila sedang dliiburkan.
2. Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1245:
"Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya"

Berdasarkan uraian dan data serta fakta yang ada, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo sebagai berikut :

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat secara Keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat tidak punya kewajiban membayar Kompensasi Upah saat libur Penggugat sesuai pernyataan tertulis Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 Februari 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20.4 berupa:

1. Fotokopi Anjuran No. 565.15/4249.7.3/XI/2023 atas nama Is Purwanti dkk, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi SK Gubernur Jawa Tengah No; 561/54 Tahun 2022.Tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt – 25 Nov 2022 dan Periode 26 Nov-25 Des 2022 dari Penggugat I (Is Purwanti), diberi tanda bukti P-3.1;
4. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Des 2022 – 25 Jan 2023 dan Periode 26 Jan-25 Feb 2023 dari Penggugat I, diberi tanda bukti P-3.2;
5. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan Periode 26 Mar-25 Apr 2023 dari Penggugat I, diberi tanda bukti P-3.3;
6. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Apr – 25 Mei 2023 dan Periode 26 Mei-25 Juni 2023 dari Penggugat I, diberi tanda bukti P-3.4;
7. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juni – 25 Juli 2023 dan Periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat I, diberi tanda bukti P-3.5;
8. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug – 25 Sep 2023 dan Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dari Penggugat I, diberi tanda bukti P-3.6;
9. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt – 25 Nov 2023 dari Penggugat I, diberi tanda bukti P-3.7;
10. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Oktober 2022 dan November 2022 dari Penggugat II (Tatik Sumarsi), diberi tanda P-4.1;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Desember 2022 dan periode Januari 2023 dari Penggugat II, diberi tanda bukti P-4.2;
12. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Maret 2023 dan periode Mei 2023 dari Penggugat II, diberi tanda bukti P-4.3;
13. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Juli 2023 dan Foto Copy dari Print out Email periode 26 Juni – 25 Juli 2023 dari Penggugat II, diberi tanda bukti P-4.4;
14. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juli – 25 Aug 2023 dan Periode 26 Aug-25 Sep 2023 dari Penggugat II, diberi tanda bukti P-4.5;
15. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sep – 25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nov 2023 dari Penggugat II, diberi tanda bukti P-4.6;
16. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode September 2022 dan Oktober 2022 dari Penggugat III (Apit Sumadiana), diberi tanda bukti P-5.1;
17. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode November 2022 dan periode Desember 2022 dari Penggugat III, diberi tanda bukti P-5.2;
18. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Januari 2023 dan periode Maret 2023 dari Penggugat III, diberi tanda bukti P-5.3;
19. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Mei 2023 dan periode Juli 2023 dari Penggugat III, diberi tanda bukti P-5.4;
20. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Agustus 2023 dan Foto Copy dari Print out Email periode 26 Aug – 25 Sept 2023 dari Penggugat III, diberi tanda bukti P-5.5;
21. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept – 25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nov 2023 dari Penggugat III, diberi tanda bukti P-5.6;
22. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt – 25 Nov 2022 dan Periode 26 Nov-25 Des 2022 dari Penggugat IV (Eni Hastuti), diberi tanda bukti P-6.1;
23. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dan Periode 26 Feb-25 Mar 2023 dari Penggugat IV, diberi tanda bukti P-6.2;
24. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mar – 25 Apr 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat IV, diberi tanda bukti P-6.3;
25. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dan Periode 26 Juni-25 Juli 2023 dari Penggugat IV, diberi tanda bukti P-6.4;
26. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juli-25 Aug 2023 dan Periode 26 Aug – 25 sept 2023 dari Penggugat IV, diberi tanda bukti P-6.5
27. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept-25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt – 25 Nov 2023 dari Penggugat IV, diberi tanda bukti P-6.6;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt – 25 Nov 2022 dan Periode 26 Nov-25 Des 2022 dari Penggugat V (Evi Nur Wijayanti), diberi tanda bukti P-7.1;
29. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Des 2022– 25 Jan 2023 dan Periode 26 Jan-25 Feb 2023 dari Penggugat V, diberi tanda bukti P-7.2;
30. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat V, diberi tanda bukti P-7.3;
31. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juni – 25 Juli 2023 dan Periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat V, diberi tanda bukti P-7.4;
32. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug – 25 Sep 2023 dan Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dari Penggugat V, diberi tanda bukti P-7.5;
33. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt – 25 Nov 2023 dari Penggugat V, diberi tanda bukti P-7.6;
34. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept – 25 Okt 2022 dan Periode 26 Okt-25 Nov 2022 dari Penggugat VI (Sukamto), diberi tanda bukti P-8.1;
35. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Nov – 25 Des 2022 dan Periode 26 Jan 2023 -25 Feb 2023 dari Penggugat VI, diberi tanda bukti P-8.2;
36. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mar – 25 Apr 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat VI, diberi tanda bukti P-8.3;
37. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dan Periode 26 Juni-25 Juli 2023 dari Penggugat VI, diberi tanda bukti P-8.4;
38. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juli – 25 Aug 2023 dan Periode 26Aug-25 Sept 2023 dari Penggugat VI, diberi tanda bukti P-8.5;
39. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept – 25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nov 2023 dari Penggugat VI, diberi tanda bukti P-8.6;
40. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode September, Oktober, dan November 2022 dari Penggugat VII (Eko Supriyanto), diberi tanda bukti P-9.1;
41. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Desember 2022 dan periode Januari 2023 dari Penggugat VII, diberi tanda bukti P-9.2;
42. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Maret 2023 dan periode Mei 2023 dari Penggugat VII, diberi tanda bukti P-9.3;
43. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Juli 2023 dan periode Agustus 2023 dari Penggugat VII, diberi tanda bukti P-9.4;
44. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode Oktober 2023 dan periode November 2023 dan Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Okt-25 Nov 2023 dari Penggugat VII, diberi tanda bukti P-9.5;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept – 25 Okt 2022 dan Periode 26 Nov-25 Des 2022 dari Penggugat VIII (Sri Hartini), diberi tanda bukti P-10.1;
46. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Des 2022 – 25 Jan 2023 dan Periode 26 Jan-25 Feb 2023 dari Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-10.2;
47. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan Periode 26 Mar-25 Apr 2023 dari Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-10.3;
48. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Apr – 25 Mei 2023 dan Periode 26 Mei-25 Juni 2023 dari Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-10.4;
49. Fotokopi dari Print out rekening BCA periode periode Agustus 2023 dan Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug-25 Sept 2023 dari Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-10.5;
50. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept-25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt – 25 Nov 2023 dari Penggugat VIII, diberi tanda bukti P-10.6;
51. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Sept – 25 Okt 2022 dan Periode 26 Okt-25 Nov 2022 dari Penggugat IX (Yayuk Dwi Lestari), diberi tanda bukti P-11.1;
52. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Nov – 25 Des 2022 dan Periode 26 Jan 2023 -25 Feb 2023 dari Penggugat IX, diberi tanda bukti P-11.2;
53. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan Periode 26 Mar-25 Apr 2023 dari Penggugat IX, diberi tanda bukti P-11.3;
54. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Apr – 25 Mei 2023 dan Periode 26 Mei-25 Juni 2023 dari Penggugat IX, diberi tanda bukti P-11.4;
55. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juni – 25 Juli 2023 dan Periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat IX, diberi tanda bukti P-11.5;
56. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug – 25 Sep 2023, Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat IX, diberi tanda bukti P-11.6;
57. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt – 25 Nov 2022 dan Periode 26 Nov-25 Des 2022 dari Penggugat X (Catur Rahayu), diberi tanda bukti P-12.1;
58. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Des 2022 – 25 Jan 2023 dan Periode 26 Jan 2023 -25 Feb 2023 dari Penggugat X, diberi tanda bukti P-12.2;
59. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat X, diberi tanda bukti P-12.3;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dan Periode 26 Juni-25 Juli 2023 dari Penggugat X, diberi tanda bukti P-12.4;
61. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juli-25 Aug 2023 dan Periode 26 Aug – 25 Sep 2023 dari Penggugat X, diberi tanda bukti P-12.5;
62. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat X, diberi tanda bukti P-12.6;
63. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Nov-25 Des 2022 dan 26 Jan 2023 -25 Feb 2023 dari Penggugat XII (Sumarni), diberi tanda bukti P-13.1;
64. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat XII, diberi tanda bukti P-13.2;
65. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mar – 25 Apr 2023 dan Periode 26 Mei-25 Juni 2023 dari Penggugat XII, diberi tanda bukti P-13.3;
66. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Juni-25 Juli 2023 dan periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat XII, diberi tanda bukti P-13.4;
67. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug-25 Sept 2023 dan Periode 26 Sept-25 Okt 2023 dan 26 Okt-25 Nov 2023 dari Penggugat XII, diberi tanda bukti P-13.5;
68. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Sep-Okt 2022 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2022 dari Penggugat XIII (Sri Wahyuni), diberi tanda bukti P-14.1;
69. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Nov – 25 Des 2022 dan Periode 26 Des-25 Jan 2023 dari Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-14.2;
70. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dan 26 Feb – 25 Mar 2023 dari Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-14.3;
71. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mar- 25 Apr 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-14.4;
72. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dan Periode 26 Juni-25 Juli 2023 dari Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-14.5;
73. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juli-25 Aug 2023 dan Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dari Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-14.6;
74. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Aug-25 Sep 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat XIII, diberi tanda bukti P-14.7;
75. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Sep-Okt 2022 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2022 dari Penggugat XIV (Parinem), diberi tanda bukti P-15.1;
76. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Nov – 25 Des 2022 dan Periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dari Penggugat XIV, diberi tanda bukti P-15.2;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan 26 Mar-25 Apr 2023 dari Penggugat XIV, diberi tanda bukti P-15.3;
78. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Apr-25 Mei 2023 dan Periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dari Penggugat XIV, diberi tanda bukti P-15.4;
79. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juni-25 Juli 2023 dan Periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat XIV, diberi tanda bukti P-15.5;
80. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug-25 Sep 2023 dan Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dari Penggugat XIV, diberi tanda bukti P-15.6;
81. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat XIV, diberi tanda bukti P-15.7;
82. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Nov-25 Des 2022 dan 26 Des 2022 -25 Jan 2023 dari Penggugat XV (Sri Ningsih), diberi tanda bukti P-16.1;
83. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dan Periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dari Penggugat XV, diberi tanda bukti P-16.2;
84. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mar – 25 Apr 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat XV, diberi tanda bukti P-16.3;
85. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Mei-25 Juni 2023 dan periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat XV, diberi tanda bukti P-16.4;
86. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug-25 Sept 2023 dan Periode 26 Sept-25 Okt 2023 dan dari Penggugat XV, diberi tanda bukti P-16.5;
87. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Okt-25 Nov 2023 dari Penggugat XV, diberi tanda bukti P-16.6;
88. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Sep-Okt 2022 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2022 dari Penggugat XVI (Sri Murtini), diberi tanda bukti P-17.1;
89. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Nov – 25 Des 2022 dan Periode 26 Des-25 Jan 2023 dari Penggugat XVI, diberi tanda bukti P-17.2;
90. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dan 26 Feb – 25 Mar 2023 dari Penggugat XVI, diberi tanda bukti P-17.3;
91. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mar- 25 Apr 2023 dan Periode 26 Apr-25 Mei 2023 dari Penggugat XVI, diberi tanda bukti P-17.4;
92. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Mei – 25 Juni 2023, periode 26 Juni-25 Juli 2023 dan Periode 26 Aug-25 Sep 2023 dari Penggugat XVI, diberi tanda bukti P-17.5;
93. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat XVI, diberi tanda bukti P-17.6;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Sep-Okt 2022 dan Periode 26 Nov – 25 Des 2022 dari Penggugat XVII (Triyanto), diberi tanda bukti P-18.1;
95. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Des – 25 Jan 2022 dan Periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dari Penggugat XVII, diberi tanda bukti P-18.2;
96. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Feb – 25 Mar 2023 dan 26 Mar-25 Apr 2023 dari Penggugat XVII, diberi tanda bukti P-18.3;
97. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Apr-25 Mei 2023 dan Periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dari Penggugat XVII, diberi tanda bukti P-18.4;
98. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juni-25 Juli 2023 dan Periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat XVII, diberi tanda bukti P-18.5;
99. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Aug-25 Sep 2023 dan Periode 26 Sep-25 Okt 2023 dari Penggugat XVII, diberi tanda bukti P-18.6;
100. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat XVII, diberi tanda bukti P-18.7;
101. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Nov – 25 Des 2022 dan Periode 26 Des-25 Jan 2023 dari Penggugat XVIII (Sri Wiyarni), diberi tanda bukti P-19.1;
102. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Jan – 25 Feb 2023 dan 26 Mar- 25 Apr 2023 dari Penggugat XVIII, diberi tanda bukti P-19.2;
103. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Apr-25 Mei 2023 dan Periode 26 Mei – 25 Juni 2023 dari Penggugat XVIII, diberi tanda bukti P-19.3;
104. Fotokopi dari Print out Email periode 26 Juni-25 Juli 2023 dan Periode 26 Juli-25 Aug 2023 dari Penggugat XVIII, diberi tanda bukti P-19.4;
105. Fotokopi dari Print out Email Periode 26 Aug-25 Sep 2023, 26 Sep-25 Okt 2023 dan Periode 26 Okt-25 Nop 2023 dari Penggugat XVIII, diberi tanda bukti P-19.5;
106. Fotokopi KTA Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari Penggugat, I, II, IV dan V, diberi tanda bukti P-20.1;
107. Fotokopi KTA Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari Penggugat VI, VII, VIII dan IX, diberi tanda bukti P-20.2;
108. Fotokopi KTA Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari Penggugat XIII, XIV, XV dan XVI, diberi tanda bukti P-20.3;
109. Fotokopi KTA Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari Penggugat XVII, XVIII dan III, diberi tanda bukti P-20.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 berupa:

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor:560/1415.4 tanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (AD dan ART FKSPN), diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Order Produksi AJL Januari 2023, diberi tanda bukti T-3;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yaitu: EKO SUPRIYANTO dan AFFIE KUSDIYANTO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUPRIYANTO

- Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat sejak 2001;
- Bahwa saksi bekerja di bagian wrapping;
- Bahwa di tempat Tergugat terdapat beberapa departemen seperti produksi, utility, inspecting, dll;
- Bahwa perusahaan bergerak dalam bidang benang jadi kain;
- Bahwa jumlah karyawan di perusahaan tersebut sekitar 1500 orang;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena sama-sama bekerja di Tergugat, Para Penggugat ada yang bekerja di bagian operator, produksi, dll;
- Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat karena Para Penggugat diliburkan atau dirumahkan dan kekurangan gaji;
- Bahwa setahu saya di dalam perusahaan ada serikat pekerja yang bernama SPN;
- Bahwa Ketua SPN tersebut Bapak Sukidi;
- Bahwa belum pernah diadakan pemilihan ketua SPN;
- Bahwa selama dirumahkan Para Penggugat gajinya dipotong belum pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa karyawan diliburkan ada yang 17 hari, 20 hari;
- Bahwa saksi mempunyai kartu anggota SPN;
- Bahwa setiap bulan dipotong gaji sejumlah 5 ribu untuk iuran SPN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang 5 ribu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat keputusan pengangkatan pengurus SPN tersebut;
- Bahwa selama diliburkan/dirumahkan para karyawan siap bekerja;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasie yang menyampaikan kepada para pekerja penyebab gaji berkurang karena karyawan diliburkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setiap setahun sekali diadakan rapat pembahasan AD/ART di masjid perusahaan;
- Bahwa sebelumnya jumlah karyawan di perusahaan sekitar 2000 an orang, sekarang tinggal 500 an orang;
- Bahwa status kepegawaian Para Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat adalah karyawan tetap dari nomor NIP yang ada di slip gaji atau nametag, kalau 3 huruf berarti karyawan tetap, kalau 5-6 huruf berarti karyawan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu karyawan kontrak;
- Bahwa Para Penggugat dirumahkan sekitar tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat tersebut dirumahkan dari para kasie setiap bagian memberitahukan secara lisan atau melalui whatsapp masing-masing;
- Bahwa setahu saksi tidak disampaikan Para Penggugat tersebut dirumahkan diberitahu kalau digaji atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah menyampaikan keluhan perihal tidak disampaikannya Para Penggugat tersebut dirumahkan diberitahu kalau digaji atau tidak;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dibicarakan antara serikat pekerja dengan perusahaan terkait dirumahkannya para pekerja;
- Bahwa pernah diadukan ke Dinas perihal para pekerja tersebut dirumahkan tetapi hasilnya apa saya tidak tahu;
- Bahwa Para Penggugat sekarang masih bekerja;
- Bahwa yang membagi jadwal kerja masing-masing pekerja adalah kepala bagian masing-masing;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan para pekerja dirumahkan;
- Bahwa cuti Bersama tetap ada dan ada THR tetapi tidak full (sekitar 50%-70%);
- Bahwa Para pekerja yang dirumahkan tidak ada musyawarah dengan SPN;
- Bahwa ada lowongan penambahan pegawai baru tetapi tidak ada yang berminat (para mantan karyawan);

2. Saksi AFFIE KUSDIYANTO

- Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat sejak 2001;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bagian wrapping;
- Bahwa di tempat Tergugat terdapat beberapa departemen seperti produksi, utility, inspecting, dll;
- Bahwa perusahaan bergerak dalam bidang benang jadi kain;
- Bahwa jumlah karyawan di perusahaan tersebut sekitar 1500 orang;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena sama-sama bekerja di Tergugat, Para Penggugat ada yang bekerja di bagian operator, produksi, dll;
- Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat karena Para Penggugat diliburkan atau dirumahkan dan kekurangan gaji;
- Bahwa setahu saksi di dalam perusahaan ada serikat pekerja yang bernama SPN;
- Bahwa Ketua SPN tersebut Bapak Sukidi;
- Bahwa belum pernah diadakan pemilihan ketua SPN;
- Bahwa selama dirumahkan Para Penggugat gajinya dipotong belum pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa karyawan diliburkan ada yang 17 hari, 20 hari;
- Bahwa saksi mempunyai kartu anggota SPN;
- Bahwa setiap bulan dipotong gaji sejumlah 5 ribu untuk iuran SPN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang 5 ribu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat keputusan pengangkatan pengurus SPN tersebut;
- Bahwa selama diliburkan/dirumahkan para karyawan siap bekerja;
- bahwa kasie yang menyampaikan kepada para pekerja penyebab gaji berkurang karena karyawan diliburkan;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setiap setahun sekali diadakan rapat pembahasan AD/ART di masjid perusahaan;
- bahwa sebelumnya jumlah karyawan di perusahaan sekitar 2000 an orang, sekarang tinggal 500 an orang;
- bahwa status kepegawaian Para Penggugat adalah karyawan tetap;
- bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat adalah karyawan tetap dari nomor NIP yang ada di slip gaji atau nametag, kalau 3 huruf berarti karyawan tetap, kalau 5-6 huruf berarti karyawan kontrak;
- bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu karyawan kontrak;
- bahwa Para Penggugat dirumahkan sekitar tahun 2020 hingga sekarang;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat tersebut dirumahkan dari para kasie setiap bagian memberitahukan secara lisan atau melalui whatsapp masing-masing;
- bahwa setahu saksi tidak disampaikan Para Penggugat tersebut dirumahkan diberitahu kalau digaji atau tidak;
- bahwa saksi belum pernah menyampaikan keluhan perihal tidak disampaikannya Para Penggugat tersebut dirumahkan diberitahu kalau digaji atau tidak;
- bahwa setahu saksi belum pernah dibicarakan antara serikat pekerja dengan perusahaan terkait dirumahkannya para pekerja;
- bahwa pernah diadakan ke Dinas perihal para pekerja tersebut dirumahkan tetapi hasilnya apa saksi tidak tahu;
- bahwa Para Penggugat sekarang masih bekerja;
- bahwa yang membagi jadwal kerja masing-masing pekerja adalah kepala bagian masing-masing;
- bahwa tidak ada surat pemberitahuan para pekerja dirumahkan;
- bahwa cuti Bersama tetap ada dan ada THR tetapi tidak full (sekitar 50%-70%);
- bahwa Para pekerja yang dirumahkan tidak ada musyawarah dengan SPN;
- bahwa ada lowongan penambahan pegawai baru tetapi tidak ada yang berminat (para mantan karyawan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yaitu: SUMARSO dan SRI KARTINI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUMARSO

- Bahwa di dalam PT. Delta Merlin Dunia Textile II ada satu serikat pekerja yaitu Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (SPN);
- Bahwa saksi salah satu pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) tersebut;
- Bahwa ketika ada permasalahan terhadap para pekerja dengan perusahaan, saya sebagai pengurus memberi masukan baik secara lisan ataupun tertulis kepada management;
- Bahwa ketika ada kebijakan dari perusahaan serikat pekerja dan kepala bagian masing-masing diajak untuk berunding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada kebijakan dari perusahaan, serikat pekerja memberitahu kepada karyawan dengan sosialisasi melalui kepala seksi, kepala ruangan masing-masing;
- Bahwa jika karyawan ada yang tidak masuk atau dirumahkan maka yang membagi jadwal tersebut adalah kepala bagian masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ada;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa jabatan saksi di serikat pekerja sebagai bendahara;
- Bahwa saksi sebagai bendahara serikat pekerja sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2010 hingga 2023 ada pemungutan suara atau pemilihan pengurus serikat pekerja, ada SK dan pelantikannya;
- Bahwa jumlah anggota serikat pekerja tersebut sekitar 400 orang;
- Bahwa Para Penggugat bukan anggota serikat pekerja di tempat saksi, saksi baru tahu setelah diberitahu ketua SPN;
- Bahwa saksi tidak tahu bila serikat pekerja tidak boleh dihalang-halangi baik oleh pemerintah, pengusaha dan partai politik;
- Bahwa belum ada kesepakatan antara KSPN dengan perusahaan;
- Bahwa KSPN adalah kesatuan serikat pekerja nasional;
- KSPN ada kartu anggotanya;
- Bahwa sebelumnya para penggugat anggota KSPN lalu keluar, sejak kapan mereka keluar saya lupa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada organisasi serikat pekerja lainnya di perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi SPN sebelum menjadi KSPN, KSPN mulai tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah secara perorang/pribadi ada yang membuat kesepakatan dengan perusahaan;
- Bahwa mekanisme bila ada anggota yang keluar dari KSPN saya tidak tahu persis namun seharusnya pamit;
- Bahwa saksi juga pernah dirumahkan;
- Bahwa saksi tahu dirumahkan karena ada pemberitahuan secara lisan oleh kepala bagian;
- Bahwa semenjak ada yang dirumahkan karyawan tidak mendapatkan cuti tahunan dari perusahaan;
- Bahwa karyawan dirumahkan sejak tahun 2019 saat mulai ada covid;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



- Bahwa ada pemberitahuan para pekerja dirumahkan dan tidak dibayarkan;
- Bahwa terhadap para pekerja dirumahkan dan tidak dibayarkan tersebut, organisasi menolak, saksi sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis ke Dinas juga, ada anjuran dari Dinas tetapi tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi anjuran dari Dinas untuk dibicarakan secara bipartit;

2. Saksi SRI KARTINI

- Bahwa ketika ada kebijakan dari perusahaan serikat pekerja dan kepala bagian masing-masing diajak untuk berunding;
- Bahwa jika ada kebijakan dari perusahaan, serikat pekerja memberitahu kepada karyawan dengan sosialisasi melalui kepala seksi, kepala ruangan masing-masing;
- Bahwa jika karyawan ada yang tidak masuk atau dirumahkan maka yang membagi jadwal tersebut adalah kepala bagian masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ada;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi di bagian produksi pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan di perusahaan tersebut pada awal saksi masuk sejumlah 1500 orang;
- Bahwa jumlah perusahaan di wilayah Kebakkramat setahu saya ada 3 (tiga);
- Bahwa Perusahaan tersebut masih berproduksi;
- Bahwa KSPN adalah kesatuan serikat pekerja nasional;
- Bahwa KSPN ada kartu anggotanya;
- Bahwa saksi juga pernah dirumahkan;
- Bahwa karyawan tahu dirumahkan karena ada pemberitahuan secara lisan atau whatsapp di grup oleh kepala bagian;
- Bahwa semenjak ada yang dirumahkan karyawan tidak mendapatkan cuti tahunan dari perusahaan;
- Bahwa karyawan dirumahkan sejak tahun 2019 saat mulai ada covid;
- Bahwa ada pemberitahuan para pekerja dirumahkan dan tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi digaji dengan cara ditransfer melalui BCA setiap tanggal 1;
- Bahwa jam kerja karyawan di perusahaan tersebut ada yang jam 07.00-15.00, jam 15.00-23.00, jam 23.00-07.00 WIB;



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai: menuntut dibayarkan upah diliburkan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2023 dan hak cuti tahunan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tegugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat sudah memberitahukan tentang kondisi dan kebijakan Upah Perusahaan kepada penggugat dan seluruh karyawan secara resmi melalui perwakilan Karyawan (pengurus KSPN) dalam Pertemuan Bipartit. Karyawan sudah mengetahui dan menerima dengan bukti semua karyawan membuat surat pernyataan tanpa ada paksaan dari pihak manapun
2. Kondisi makro dunia pertekstilan yang sulit adalah kondisi yang tidak disengaja dan tidak diirencanakan oleh Tergugat, kondisi yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dikendalikan juga tidak dapat dicegah oleh Tergugat akibat dampak berkelanjutan dari covid19.
3. Tergugat tidak memperkerjakan Penggugat bukan sebuah kesengajaan namun karena kondisi memaksa karena sepiunya Order Produksi yang masuk

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal tentang telah terjadi peristiwa Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang selama dirumahkan Para Penggugat mendapatkan upah atau tidak?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan juga dalil jawabannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan persidangan tanggal 5 Februari 2024, Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurnya Penggugat XI atas nama Tri Purnani perlu memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat perbaikan gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 5 Februari 2024 terkait mundurnya Penggugat XI atas nama Tri Purnani dalam perkara a quo dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menerima perbaikan gugatan tersebut dengan mengeluarkan Penggugat XI dari Para Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat XI dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum Penggugat secara berurutan, dimulai dengan petitum angka 1, karena petitum angka 1 memiliki hubungan dengan petitum Penggugat lainnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum Penggugat yang berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 2 yang menuntut memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah penuh sejak Para Penggugat diliburkan dengan dalil sejak bulan September 2022 diliburkan oleh Tergugat dengan alasan sepi order dan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan SE-05/M/BW/1998 tentang Upah dirumahkan, yang kemudian oleh Tergugat dibantah dengan dalil Tergugat sudah memberitahukan tentang kondisi dan kebijakan Upah Perusahaan kepada penggugat dan seluruh karyawan secara resmi melalui perwakilan Karyawan (pengurus KSPN) dalam Pertemuan Bipartit. Karyawan sudah mengetahui dan menerima dengan bukti semua karyawan membuat surat pernyataan termasuk Para Penggugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Kondisi makro dunia pertekstilan yang sulit adalah kondisi yang tidak disengaja dan tidak diirencanakan oleh Tergugat, kondisi yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dikendalikan juga tidak dapat dicegah oleh Tergugat akibat dampak berkelanjutan dari covid19, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1245: "Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat mendalilkan meliburkan Para Penggugat karena terdampak covid-19 berkelanjutan dan Para Penggugat telah menanda tangani surat pernyataan diliburkan tanpa mendapatkan upah sebagaimana keterangan saksi EKO SUPRIYANTO, saksi AFFIE

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSDIYANTO, saksi SUMARSO dan saksi SRI KARTINI yang pada pokoknya menerangkan diliburkan tidak dibayar upahnya, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat pernyataan atau surat perjanjian antara Tergugat dengan Para Penggugat atau dengan serikat pekerja tentang upah selama diliburkan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi EKO SUPRIYANTO, saksi AFFIE KUSDIYANTO, saksi SUMARSO dan saksi SRI KARTINI yang pada pokoknya menerangkan tidak ada surat apapun terkait diliburkan, dengan demikian berdasarkan tidak bekerjanya Para Penggugat bukanlah kehendak dari Para Penggugat, melainkan perintah dari Tergugat kepada Para Penggugat yang meliburkan Para Penggugat secara bergilir sebagaimana keterangan saksi SUMARSO dan saksi SRI KARTINI yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat dirumahkan oleh kepala bagian melalui pengumuman grup WA, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengabulkan Petitum Para Penggugat angka 2 dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 3 yang menuntut menghukum kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kekurangan upah Para Penggugat, maka sebagaimana pertimbangan sebelumnya Tergugat terbukti tidak membayar upah Para Penggugat selama diliburkan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dan terhadap dalil upah yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dan bukti tentang upah yang diterima oleh Para Penggugat bertanda P-3.1 sampai dengan P-19.5 tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum Para Penggugat angka 3 dengan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kekurangan upah Para Penggugat selama diliburkan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Para Penggugat	Gaji Bulan	Gaji Seharusnya	Gaji Yang diterima	Kekurangan Gaji
Penggugat I		Rp	Rp	Rp
	November'22	2,064,131	1,100,967	963,164
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,131	1,445,019	619,112
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	919,785	1,287,698
	Rp	Rp	Rp	
Februari	2,207,483	1,103,742	1,103,741	
	Rp	Rp	Rp	
Maret		Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,207,483	735,828	1,471,655
		Rp	Rp	Rp
April		2,207,483	882,994	1,324,489
		Rp	Rp	Rp
Mei		2,207,483	809,411	1,398,072
		Rp	Rp	Rp
Juni		2,207,483	1,177,325	1,030,158
		Rp	Rp	Rp
Juli		2,207,483	1,508,447	699,036
		Rp	Rp	Rp
Agustus		2,207,483	956,576	1,250,907
		Rp	Rp	Rp
September		2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
Oktober		2,207,483	809,411	1,398,072
		Rp	Rp	Rp
November		2,207,483	882,994	1,324,489
				Rp
		JUMLAH		14,827,168
Penggugat II		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,460,746	603,567
		Rp	Rp	Rp
	November	2,064,313	1,535,405	528,908
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,689,924	374,389
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	1,349,932	857,551
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,404,023	803,460
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	839,095	1,368,388
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	734,802	1,472,681
		Rp	Rp	Rp
	Mei	2,207,483	586,637	1,620,846
		Rp	Rp	Rp
	Juni	2,207,483	812,385	1,395,098
		Rp	Rp	Rp
	Juli	2,207,483	139,073	2,068,410
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	2,207,483	662,245	1,545,238	
	Rp	Rp	Rp	
September	2,207,483	956,576	1,250,907	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	809,411	1,398,072	
	Rp	Rp	Rp	
November	2,207,483	882,994	1,324,489	
			Rp	
		JUMLAH		16,612,004
Penggugat III		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	3,561,686	2,329,987	1,231,699
	November	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3,561,686	1,926,846	1,634,840	
	Rp	Rp	Rp	
Desember	3,561,686	2,354,791	1,206,895	
	Rp	Rp	Rp	
Januari'23	3,561,686	1,794,726	1,766,960	
	Rp	Rp	Rp	
Februari	3,561,686	2,008,426	1,553,260	
	Rp	Rp	Rp	
Maret	3,561,686	878,439	2,683,247	
	Rp	Rp	Rp	
April	3,561,686	1,051,895	2,509,791	
	Rp	Rp	Rp	
Mei	3,561,686	978,312	2,583,374	
	Rp	Rp	Rp	
Juni	3,561,686	1,859,809	1,701,877	
	Rp	Rp	Rp	
Juli	3,561,686	1,508,140	2,053,546	
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	3,561,686	925,060	2,636,626	
	Rp	Rp	Rp	
September	3,561,686	1,304,391	2,257,295	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	3,561,686	1,165,391	2,396,295	
	Rp	Rp	Rp	
November	3,561,686	956,576	2,605,110	
			Rp	
		JUMLAH	28,820,815	
Penggugat IV		Rp	Rp	
	November'22	2,064,313	1,307,398	756,915
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,513,830	550,483
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	-	-
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,324,490	882,993
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	882,994	1,324,489
		Rp	Rp	Rp
Mei	2,207,483	809,411	1,398,072	
	Rp	Rp	Rp	
Juni	2,207,483	1,618,822	588,661	
	Rp	Rp	Rp	
Juli	2,207,483	1,545,239	662,244	
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	2,207,483	735,828	1,471,655	
	Rp	Rp	Rp	
September	2,207,483	1,692,404	515,079	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	1,765,987	441,496	
	Rp	Rp	Rp	
November				

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



		2,207,483	1,324,490	882,993	
				Rp	
		JUMLAH			10,946,735
Penggugat V		Rp	Rp	Rp	
	November'22	2,064,313	1,100,967	963,346	
		Rp	Rp	Rp	
	Desember	2,064,313	1,376,209	688,104	
		Rp	Rp	Rp	
	Januari'23	2,207,483	1,103,742	1,103,741	
		Rp	Rp	Rp	
	Februari	2,207,483	956,576	1,250,907	
		Rp	Rp	Rp	
	Maret	2,207,483	735,828	1,471,655	
		Rp	Rp	Rp	
	April	2,207,483	-	-	
		Rp	Rp	Rp	
	Mei	2,207,483	809,411	1,398,072	
		Rp	Rp	Rp	
	Juni	2,207,483	-	-	
		Rp	Rp	Rp	
Juli	2,207,483	1,471,656	735,827		
	Rp	Rp	Rp		
Agustus	2,207,483	956,576	1,250,907		
	Rp	Rp	Rp		
September	2,207,483	1,324,490	882,993		
	Rp	Rp	Rp		
Oktober	2,207,483	1,324,490	882,993		
	Rp	Rp	Rp		
November	2,207,483	1,030,159	1,177,324		
				Rp	
		JUMLAH			11,805,869
Penggugat VI		Rp	Rp	Rp	
	Oktober'22	2,064,313	1,445,019	619,294	
		Rp	Rp	Rp	
	November	2,064,313	1,238,588	825,725	
		Rp	Rp	Rp	
	Desember	2,064,313	1,582,640	481,673	
		Rp	Rp	Rp	
	Januari'23	2,207,483	-	-	
		Rp	Rp	Rp	
	Februari	2,207,483	1,250,908	956,575	
		Rp	Rp	Rp	
	Maret	2,207,483	-	-	
		Rp	Rp	Rp	
April	2,207,483	882,994	1,324,489		
	Rp	Rp	Rp		
Mei	2,207,483	809,411	1,398,072		
	Rp	Rp	Rp		
Juni	2,207,483	1,250,908	956,575		
	Rp	Rp	Rp		
Juli	2,207,483	1,545,239	662,244		
	Rp	Rp	Rp		
Agustus				Rp	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,207,483	1,030,159	1,177,324
		Rp	Rp	Rp
September		2,207,483	1,324,490	882,993
		Rp	Rp	Rp
Oktober		2,207,483	1,324,490	882,993
		Rp	Rp	Rp
November		2,207,483	1,030,159	1,177,324
				Rp
		JUMLAH		11,345,281
Penggugat VII		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	3,448,780	2,257,987	1,190,793
		Rp	Rp	Rp
	November	3,448,780	1,862,846	1,585,934
		Rp	Rp	Rp
	Desember	3,448,780	2,317,848	1,130,932
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	3,448,780	1,872,978	1,575,802
		Rp	Rp	Rp
	Februari	3,448,780	1,948,426	1,500,354
		Rp	Rp	Rp
	Maret	3,448,780	836,869	2,611,911
		Rp	Rp	Rp
	April	3,448,780	1,015,895	2,432,885
		Rp	Rp	Rp
	Mei	3,448,780	942,312	2,506,468
	Rp	Rp	Rp	
Juni	3,448,780	1,791,809	1,656,971	
	Rp	Rp	Rp	
Juli	3,448,780	1,644,140	1,804,640	
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	3,448,780	930,477	2,518,303	
	Rp	Rp	Rp	
September	3,448,780	1,300,517	2,148,263	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	3,448,780	1,003,391	2,445,389	
	Rp	Rp	Rp	
November	3,448,780	1,030,159	2,418,621	
			Rp	
		JUMLAH		27,527,266
Penggugat VIII		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,169,777	894,536
		Rp	Rp	Rp
	November	2,064,313	-	-
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,513,830	550,483
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	956,576	1,250,907
	Rp	Rp	Rp	
Februari	2,207,483	1,177,352	1,030,131	
	Rp	Rp	Rp	
Maret	2,207,483	735,828	1,471,655	
	Rp	Rp	Rp	
April				

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,207,483	882,994	1,324,489
		Rp	Rp	Rp
Mei		2,207,483	809,411	1,398,072
		Rp	Rp	Rp
Juni		2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
Juli		2,207,483	1,348,353	859,130
		Rp	Rp	Rp
Agustus		2,207,483	817,273	1,390,210
		Rp	Rp	Rp
September		2,207,483	1,765,987	441,496
		Rp	Rp	Rp
Oktober		2,207,483	1,618,822	588,661
		Rp	Rp	Rp
November		2,207,483	1,177,325	1,030,158
				Rp
		JUMLAH		13,186,503
Penggugat IX		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,582,640	481,673
		Rp	Rp	Rp
	November	2,064,313	1,376,209	688,104
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,582,640	481,673
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	-	-
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,471,656	735,827
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	1,030,159	1,177,324
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	956,576	1,250,907
		Rp	Rp	Rp
	Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
		Rp	Rp	Rp
	Juni	2,207,483	1,324,490	882,993
		Rp	Rp	Rp
	Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	2,207,483	1,177,325	1,030,158	
	Rp	Rp	Rp	
September	2,207,483	1,802,779	404,704	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	1,545,239	662,244	
	Rp	Rp	Rp	
November	2,207,483	1,376,209	831,274	
			Rp	
		JUMLAH		10,687,197
Penggugat X		Rp	Rp	Rp
	November'22	2,064,313	1,238,588	825,725
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,307,398	756,915
	Rp	Rp	Rp	
	Januari'23			

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,207,483	1,103,742	1,103,741
		Rp	Rp	Rp
Februari		2,207,483	1,177,325	1,030,158
		Rp	Rp	Rp
Maret		2,207,483	735,828	1,471,655
		Rp	Rp	Rp
April		2,207,483	-	-
		Rp	Rp	Rp
Mei		2,207,483	1,103,742	1,103,741
		Rp	Rp	Rp
Juni		2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
Juli		2,207,483	1,545,239	662,244
		Rp	Rp	Rp
Agustus		2,207,483	1,103,742	1,103,741
		Rp	Rp	Rp
September		2,207,483	1,324,490	882,993
		Rp	Rp	Rp
Oktober		2,207,483	1,398,073	809,410
		Rp	Rp	Rp
November		2,207,483	1,140,533	1,066,950
				Rp
		JUMLAH		11,773,848
Penggugat XII		Rp	Rp	Rp
	Desember'22	2,064,313	1,376,209	688,104
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	-	-
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,177,325	1,030,158
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	882,994	1,324,489
		Rp	Rp	Rp
	Mei	2,207,483	882,994	1,324,489
		Rp	Rp	Rp
	Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
	Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
		Rp	Rp	Rp
Agustus	2,207,483	1,177,325	1,030,158	
	Rp	Rp	Rp	
September	2,207,483	1,765,987	441,496	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	1,765,987	441,496	
	Rp	Rp	Rp	
November	2,207,483	1,177,325	1,030,158	
				Rp
		JUMLAH		10,401,022
Penggugat XIII		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,238,588	968,895
	November	Rp	Rp	-Rp

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2,064,313	1,100,967	1,100,967
	Rp	Rp	Rp
Desember	2,064,313	1,445,019	619,294
	Rp	Rp	Rp
Januari'23	2,207,483	1,066,951	997,362
	Rp	Rp	Rp
Februari	2,207,483	1,177,325	1,030,158
	Rp	Rp	Rp
Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
	Rp	Rp	Rp
April	2,207,483	882,994	1,324,489
	Rp	Rp	Rp
Mei	2,207,483	809,411	1,398,072
	Rp	Rp	Rp
Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
	Rp	Rp	Rp
Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
	Rp	Rp	Rp
Agustus	2,207,483	1,103,742	1,103,741
	Rp	Rp	Rp
September	2,207,483	1,324,490	882,993
	Rp	Rp	Rp
Oktober	2,207,483	1,324,490	882,993
	Rp	Rp	Rp
November	2,207,483	1,103,742	1,103,741
			Rp
		JUMLAH	12,301,245
Penggugat XIV		Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,513,830
		Rp	Rp
	November	2,064,313	791,320
		Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,204,183
		Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	-
		Rp	Rp
	Februari	2,207,483	441,497
		Rp	Rp
	Maret	2,207,483	735,828
		Rp	Rp
	April	2,207,483	625,454
		Rp	Rp
	Mei	2,207,483	1,030,159
		Rp	Rp
Juni	2,207,483	1,287,699	
	Rp	Rp	
Juli	2,207,483	1,434,865	
	Rp	Rp	
Agustus	2,207,483	1,030,159	
	Rp	Rp	
September	2,207,483	1,398,073	
	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	1,398,073	
	Rp	Rp	

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
November		2,207,483	1,177,325	1,030,158
				Rp
		JUMLAH		12,425,326
Penggugat XV		Rp	Rp	Rp
	Desember'22	2,064,313	1,445,019	619,294
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	1,103,742	1,103,741
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,103,742	1,103,741
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	882,994	1,324,489
		Rp	Rp	Rp
	Mei	2,207,483	1,103,742	1,103,741
		Rp	Rp	Rp
	Juni	2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
Juli	2,207,483	-	-	
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	2,207,483	1,030,159	1,177,324	
	Rp	Rp	Rp	
September	2,207,483	1,765,987	441,496	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	1,618,822	588,661	
	Rp	Rp	Rp	
November	2,207,483	1,177,325	1,030,158	
			Rp	
		JUMLAH		10,920,875
Penggugat XVI		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,582,640	624,843
		Rp	Rp	-Rp
	November	2,064,313	1,341,803	1,341,803
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,307,398	756,915
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	1,508,447	555,866
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,214,116	993,367
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	735,828	1,471,655
		Rp	Rp	Rp
April	2,207,483	588,662	1,618,821	
	Rp	Rp	Rp	
Mei	2,207,483	1,066,951	1,140,532	
	Rp	Rp	Rp	
Juni	2,207,483	1,324,490	882,993	
	Rp	Rp	Rp	
Juli	2,207,483	956,576	1,250,907	
	Rp	Rp	Rp	
Agustus				

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



		2,207,483	-	-
		Rp	Rp	Rp
September		2,207,483	1,287,699	919,784
		Rp	Rp	Rp
Oktober		2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
November		2,207,483	1,177,325	1,030,158
				Rp
		JUMLAH		10,860,613
Penggugat XVII		Rp	Rp	Rp
	Oktober'22	2,064,313	1,513,830	693,653
		Rp	Rp	Rp
	November	2,064,313	-	-
		Rp	Rp	Rp
	Desember	2,064,313	1,307,398	756,915
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	1,545,239	519,074
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,250,908	956,575
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	846,202	1,361,281
		Rp	Rp	Rp
	April	2,207,483	662,245	1,545,238
		Rp	Rp	Rp
	Mei	2,207,483	1,177,325	1,030,158
		Rp	Rp	Rp
Juni	2,207,483	1,471,656	735,827	
	Rp	Rp	Rp	
Juli	2,207,483	1,692,404	515,079	
	Rp	Rp	Rp	
Agustus	2,207,483	846,202	1,361,281	
	Rp	Rp	Rp	
September	2,207,483	1,177,325	1,030,158	
	Rp	Rp	Rp	
Oktober	2,207,483	1,398,073	809,410	
	Rp	Rp	Rp	
November	2,207,483	1,177,325	1,030,158	
			Rp	
		JUMLAH		12,344,807
Penggugat XVIII		Rp	Rp	Rp
	Desember'22	2,064,313	1,513,830	550,483
		Rp	Rp	Rp
	Januari'23	2,207,483	956,576	1,250,907
		Rp	Rp	Rp
	Februari	2,207,483	1,177,325	1,030,158
		Rp	Rp	Rp
	Maret	2,207,483	-	-
	Rp	Rp	Rp	
April	2,207,483	809,411	1,398,072	
	Rp	Rp	Rp	
Mei	2,207,483	809,411	1,398,072	
	Rp	Rp	Rp	
Juni				



	2,207,483	1,250,908	956,575
	Rp	Rp	Rp
Juli	2,207,483	1,545,239	662,244
	Rp	Rp	Rp
Agustus	2,207,483	1,030,159	1,177,324
	Rp	Rp	Rp
September	2,207,483	1,765,987	441,496
	Rp	Rp	Rp
Oktober	2,207,483	1,692,404	515,079
	Rp	Rp	Rp
November	2,207,483	1,398,073	809,410
			Rp
	JUMLAH		10,189,820

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 4 yang menuntut Menghukum Tergugat untuk membayar cuti tahunan tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp3.036.396,00 dengan dalil sejak tahun 2020 Para Penggugat tidak mendapatkan cuti tahunan dan terhadap penggunaan cuti tahunan tersebut tidak ada sanggahan dari Tergugat dan bukti terhadap penggunaan hak cuti tahunan Para Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat, dengan demikian Tergugat wajib mengajukan bukti Para Penggugat pernah mempergunakan hak cuti tahunannya dan tidak pula Majelis Hakim menemukan bukti tersebut dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berketetapan Para Penggugat berhak cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari per tahun sejak 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan UMK Kabupaten Karanganyar, maka hak sisa cuti tahunan kepada masing-masing Para Penggugat adalah sebesar:

- Tahun 2021: (Rp2.054.040 : 25 hari) X 12 hari = Rp 985.944,00
 - Tahun 2022: (Rp2.064.313 : 25 hari) X 12 hari = Rp 990.864,00
 - Tahun 2023: (Rp2.207.483 : 25 hari) X 12 hari = Rp1.059.588,00 +
- JUMLAH = Rp3.036.396,00

(tiga juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 5 yang menuntut membayar upah penuh selanjutnya apabila Para Penggugat diliburkan adalah peristiwa hukum yang masih absurd dan belum pasti, dengan demikian Majelis Hakim berketetapan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah cukup menerangkan atas perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara oleh, biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat X dan Penggugat XII sampai dengan Penggugat XVIII untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat XI tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan upah diliburkan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X dan Penggugat XII sampai dengan Penggugat XVIII sejak bulan September 2022 sampai dengan Desember 2023 dan cuti tahunan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kekurangan upah diliburkan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 dan cuti tahunan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat X dan Penggugat XII sampai dengan Penggugat XVIII dengan rincian sebagai berikut;

1) Penggugat I

- Kekurangan upah diliburkan : Rp14.827.168,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp17.863.564,00

(tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)

2) Penggugat II

- Kekurangan upah diliburkan : Rp16.612.004,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp19.648.400,00

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

3) Penggugat III

- Kekurangan upah diliburkan : Rp28.820.815,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp31.857.211,00

(tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah)

4) Penggugat VI

- Kekurangan upah diliburkan : Rp10.946.735,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp13.983.131,00

(tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu rupiah)

5) Penggugat V

- Kekurangan upah diliburkan : Rp11.805.869,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp14.842.265,00

(empat belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

6) Penggugat VI

- Kekurangan upah diliburkan : Rp11.345.281,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp14.381.677,00

(empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

7) Penggugat VII

- Kekurangan upah diliburkan : Rp27.527.266,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp30.563.662,00

(tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)

8) Penggugat VIII

- Kekurangan upah diliburkan : Rp13.186.503,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp16.222.899,00

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

9) Penggugat IX

- Kekurangan upah diliburkan : Rp10.687.197,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp13.723.593,00

(tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)

10)Penggugat X

- Kekurangan upah diliburkan : Rp11.773.848,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp14.810.244,00

(empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)

11)Penggugat XII

- Kekurangan upah diliburkan : Rp10.401.022,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp13.437.418,00

(tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah)

12)Penggugat XIII

- Kekurangan upah diliburkan : Rp12.301.245,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp15.337.641,00

(lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)

13)Penggugat XIV

- Kekurangan upah diliburkan : Rp12.425.326,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp15.461.722,00

(lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah)

14)Penggugat XV

- Kekurangan upah diliburkan : Rp10.920.875,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp13.957.271,00

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)

15)Penggugat XVI

- Kekurangan upah diliburkan : Rp10.860.613,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp13.897.009,00

(tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan rupiah)

16)Penggugat XVII

- Kekurangan upah diliburkan : Rp12.344.807,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp15.381.203,00

(lima belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah)

17)Penggugat XVIII

- Kekurangan upah diliburkan : Rp10.189.820,00
- Cuti tahunan : Rp 3.036.396,00 +
- Jumlah : Rp13.226.216,00

(tiga belas juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah)

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulisty, S.H., dan Suwardiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Novianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Catur Sulisty, S.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Suardiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novianti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 15.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan Akhir | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 + |
| JUMLAH | : Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)